

RENCANA KERJA

**KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN DAWARBLANDONG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Dawarblandong Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Dawarblandong Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2023
CAMAT DAWARBLANDONG

AKHMAD TAUFIQ, S.Sos.,MM.
Pembina
NIP. 19700626 199003 1 006

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Dawarblandong merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

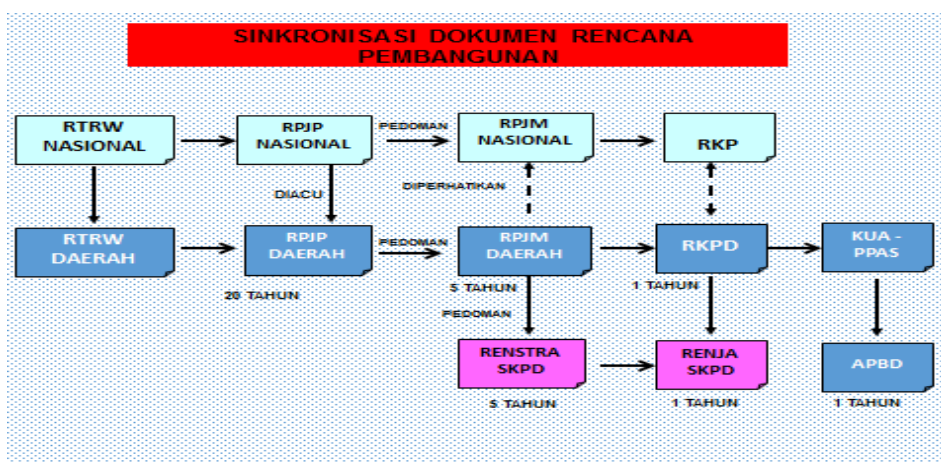
Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Dawarblandong yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Dawarblandong adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Dawarblandong Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Dawarblandong yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Dawarblandong.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perubahan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
24. Peraturan Daerah kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 04 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4)

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
29. Surat keputusan Camat Dawarblandong Nomor : 050/286/416-317/2023 tentang tim penyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Dawarblandong sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Dawarblandong ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dawarblandong. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaPerangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT SAMAPI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Dawarblandong pada tahun 2021 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2022 diuraikan sebagaimana table 2.1 berikut::

Tabel 2.1.
Realisasi belanja sampai dengan Triwulan II pada Kecamatan Dawarblandong Tahun
2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA
					Rp.	%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			2.988.507.960,00	1.098.352.288,00	36,75	2.059.452.172,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13.500.000,00	3.460.000,00	25,63	10.040.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	3.160.000,00	42,13	4.340.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	300.000,00	5,00	5.700.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.704.132.000,00	955.543.786,00	35,34	1.748.588.214,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.704.132.000	955.543.786,00	35,34	1.748.588.214,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10.000.000,00	6.896.000,00	68,96	3.104.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	6.896.000,00	68,96	3.104.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		99.500.000,00	50.752.100,00	51,01	48.747.900,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	7.500.000,00	93,75	500.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	18.730.000,00	62,43	11.270.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	7.583.000,00	37,92	12.417.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	3.520.000,00	70,40	1.480.000,00
			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	1.000.000,00	25,00	3.000.000,00
			Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	10.819.100,00	43,28	14.180.900,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.500.000,00	1.600.000,00	21,33	5.900.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		81.375.960,00	32.992.777,00	40,54	48.383.183,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.975.960,00	16.492.777,00	41,26	23.483.183,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.400.000,00	16.500.000,00	39,86	24.900.000,00

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80.000.000,00	48.707.625,00	60,88	31.292.375,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	19.875.625,00	49,69	20.124.375,00
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	25.000.000,00	22.332.000,00	89,33	2.668.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	6.500.000,00	43,33	8.500.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			208.120.000,00	48.823.500,00	23,46	159.296.500,00
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		208.120.000,00	48.823.500,00	23,46	159.296.500,00
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.000.000,00	15.081.500,00	60,33	9.918.500,00
			Fasilitasi Singkronisasi Perencanaa Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	25.000.000,00	11.307.000,00	45,23	13.693.000,00
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentramaan dan Ketertiban Umum	37.600.000,00	8.500.000,00	22,61	29.100.000,00
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	120.520.000,00	13.935.000,00	11,56	106.585.000,00
			JUMLAH	3.206.627.960,00	1.147.175.788,00	35,78	2.059.452.172,00

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten
Kecamatan Dawarblandong
2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja rentra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2022) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2022 (%)		Permasalahan	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(%)					81																
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAHAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan di Kecamatan Dawarblandong(%)		60.000.000		0	82,00		0	0	0	0	0	0	0	0							
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)				0	600	10.000.000	160	0	150	0	0	0	0	0							
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan(Pelayanan)					600		0	0	310	0	0	0	0	0							

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Lapora n)				30	10.000.000	7	0	0	0	0	0	0	0						
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Dawarblandong(%)		420.000.00 0	48.823.500	82,00		0	18.232.0 00	30	30.591.5 00	0	0	0	0						
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat(%)			48.823.500	82	208.120.00 0	0	1823200 0	20	3059150 0	0	0	0	0						
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(dokumen)				5	37.600.000	1	2.500.00 0	1	6.000.00 0	0	0	0	0		8.500.00 0				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(dokumen)				5	25.000.000	2	10.807.0 00	0	500.000	0	0	0	0		11.307.0 00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(doku men)				5	120.520.00 0	1	3.925.00 0	1	10.010.0 00	0	0	0	0		13.935.0 00				

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(dokumen)					8	25.000.000	0	1.000.00 0	3	14.081.5 00	0	0	0	0		15.081.5 00					
1	Terwujud nya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)					77.88(B B)																
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Dawarblandong(nilai)		4.506.935. 586	1.098.352. 288	77,88 (BB)			0	308.808. 461	0	789.543. 827	0	0	0	0							
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)			955.543.78 6	100	2.704.132. 000	10	0	25	0	0	0	0	0								
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(Dokumen)				43		0	0	0	0	0	0	0	0								
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang)				288	2.704.132. 000	60	274.913. 607	84	680.630. 179	0	0	0	0		955.543. 786						
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)			3.460.000	100	13.500.000	0	2460000	26	1000000	0	0	0	0								
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(Dokumen)				2		0	0	0	0	0	0	0	0								
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)				2	7.500.000	1	2.460.00 0	0	700.000	0	0	0	0		3.160.00 0						

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD(Dokumen)				2		0	0	0	0	0	0	0						
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				20	6.000.000	0	0	10	300.000	0	0	0	0	300.000				
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dapat terpenuhi(%)			48.707.625	100	80.000.000	0	5500000	61	4320762 5	0	0	0	0					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si(Unit)				2	25.000.000	0	0	1	22.332.0 00	0	0	0	0	22.332.0 00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si(Unit)				2	15.000.000	0	1.500.00 0	1	5.000.00 0	0	0	0	0	6.500.00 0				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)				2	40.000.000	0	4.000.00 0	1	15.875.6 25	0	0	0	0	19.875.6 25				
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)			32.992.777	100	81.375.960	0	1340485 4	41	1958792 3	0	0	0	0					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)				24	39.975.960	6	6.804.85 4	6	9.687.92 3	0	0	0	0	16.492.7 77				

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12	41.400.000	3	6.600.00 0	3	9.900.00 0	0	0	0	0		16.500.0 00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)				50.752.100	100	99.500.000	0	1253000 0	51	3822210 0	0	0	0	0							
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					2	5.000.000	0	1.600.00 0	1	1.920.00 0	0	0	0	0		3.520.00 0					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12	7.500.000	3	1.000.00 0	3	600.000	0	0	0	0		1.600.00 0					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan(Dokumen)					3	4.000.000	0	400.000	1	600.000	0	0	0	0		1.000.00 0					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)					1	8.000.000	1	7.050.00 0	0	450.000	0	0	0	0		7.500.00 0					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5	30.000.000	0	980.000	4	17.750.0 00	0	0	0	0		18.730.0 00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12	20.000.000	0	0	6	7.583.00 0	0	0	0	0		7.583.00 0					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4	25.000.000	0	1.500.00 0	2	9.319.10 0	0	0	0	0		10.819.1 00					

3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang)				6.896.000	24	10.000.000	0	0	24	0	0	0	0								
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(Orang)					24	10.000.000	0	0	24	6.896.00 0	0	0	0	0		6.896.00 0					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan(paket)					2		0	0	0	0	0	0	0								
	[Target Capaian Sub Kegiatan]																52.0 8 %							
	[Faktor Pendoron g Keberhasi lan Kinerja]																							
	[Faktor Pengham bat Pencapai an Kerja]																							
	[Tindak Lanjut Yang Diperluka n Dalam Triwulan Berikutny a]																							
	[Tindak Lanjut Yang Diperluka n Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupate n / Kota Triwulan Berikutny a]																							

Kegiatan review evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan beberapa sub kegiatan masih sebagian yang terlaksana dari seluruh Program dan Kegiatan yang direncanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2023, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dawarblandong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,78	74,40	76,58	77,20	100.81	77,88		
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi		1 Inovasi	1 Inovasi	100	1 Inovasi		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	81%						

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	4 Dokumen		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	18 Laporan		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran PD yang dapat tercapai	90%	81%						
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	28 laporan	58 laporan	58 laporan	100	24 orang/bulan		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 Dokumen	30 laporan	NA	NA		17 Dokumen		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN Kecamatan Dawarblandong	67,15	65,21	66	66	100%	67,15		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Stel	23 Stel	23 Stel	100			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	90%						
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket		

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	8 paket		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 Paket		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 Dokumen	12 bulan	377	377	100			
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	90 %						
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 Laporan		

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	2 orang	3 orang	3 orang	100	36 Laporan		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	100%	90 %						
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabtan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Gedung	3 unit	2 unit	2 unit	100	2 Gedung		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	25 Unit	1 paket	1 paket	1 paket	100	25 Unit		
7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	81%						
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	500 Dokumen	500 Dokumen						
7.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	0 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100			

	Pelayanan Perizinan Non Usaha									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	16 Laporan	385 Dokumen	385 Dokumen	385 Dokumen	100			
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	82%	81%						
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	84 dokumen	60 fasili-tasi						
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	28 Dokumen	12 fasili-tasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi	100	4 fasili-tasi		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20 Dokumen	12 fasili-tasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi	100	4 fasili-tasi		
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 fasili-tasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi	100	4 fasili-tasi		

7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	24 Dokumen	24 fasilitasi	24 fasilitasi	24 fasilitasi	100	5 fasilitasi		
-----------------	--	--	------------	---------------	---------------	---------------	-----	--------------	--	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 7 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dawarblandong

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		IKM Kecamatan
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Pelayanan Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini

:

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Dawarblandong
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2026 (n+2)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah			76,58	77,88	79,18	80,48	81,78	77,68		79,18	80,48	Baik
2	Presentase Peningkatan Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			81%	82%	83%	84%	85%	81%		83%	84%	Baik
3	Persentase hasil koordinasi yang ditindak lanjuti			81%	82%	83%	84%	85%	81%		83%	84%	Baik

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Dawarblandong diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Dawarblandong

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Dawarblandong bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Dawarblandong yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Dawarblandong;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.

4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Dawarblandong namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana .
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Dawarblandong yang heterogen maka ini merupakan

peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Dawarblandong untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan RKPD Tahun 2024 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dawarblandong

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Dawarblandon g	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,18	2.763.679.960	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Dawarblandong	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,18	3.495.075.795	
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandon g	Persentase indikator program yang tercapai sesuai target	100%	13.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase indikator program yang tercapai sesuai target	100%	36.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	15.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	21.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	21.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandon g	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	90%	2.011.132.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	90%	2.715.132.000	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dawarblandong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang / bulan	2.000.132.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dawarblandong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang / bulan	2.704.132.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 dokumen	11.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 dokumen	11.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	IP ASN Perangkat Daerah	67,2	36.300.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	IP ASN Perangkat Daerah	67,2	41.450.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	16.300.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	21.450.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Dawarblandong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Dawarblandong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	273.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	258.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	8.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4 paket	130.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	7 paket	115.000.000	

			Disediakan					disediakan			
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	50.000.000	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	50.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	20.000.000	
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 dokumen	5.000.000	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 dokumen	5.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	40.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	40.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	20.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	94.375.960	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	118.170.595	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	52.975.960	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	55.770.595	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 laporan	41.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 laporan	62.400.000	
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	100%	142.872.000	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	100%	155.716.400	
	Pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah unit kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	8 unit	142.872.000	Pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah unit kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	8 unit	143.520.000	
	Pengadaan Mebel	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	12.196.400	Pengadaan Mebel	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	12.196.400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90%	170.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90%	170.606.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	50.466.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	75.000.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	45.140.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Dawarblandong	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	32.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Dawarblandong	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	32.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dawarblandong	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	500 pelayanan	32.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dawarblandong	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	500 pelayanan	32.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan		0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	0		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	500 laporan	32.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	500 laporan	32.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	450.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	495.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	60 fasilitasi	450.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	60 fasilitasi	495.000.000	

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	95.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	100.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 dokumen	95.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 dokumen	100.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	95.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	100.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	18 dokumen	165.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	24 dokumen	195.000.000	
JUMLAH					3.245.679.960	JUMLAH					4.022.075.795

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3.

Tabel T-C. 3.2

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Dawarblandong Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

OPD: Kecamatan Dawarblandong

	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu (Rp)	OPD penanggung jawab

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Dawarblandong ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan public sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berintegritas, Akutanbel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Public yang Optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto pada 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2024	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai IKM	80	81	82	83	84	85
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74,40	76,58	77,88	79,18	80,48	81,78
		Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80	81	82	83	84	85

CASCADING KECAMATAN DAWARBLANDONG TAHUN 2024																							
VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																							
MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan																							
TUJUAN : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal																							
Indikator Tujuan : IKM Kecamatan																							
SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola Birikrasi Perangkat Daerah																		SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal					
Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah																		Indikator Sasaran : IKM pelayanan Kecamatan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		PROGRAM		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN			
Nilai SAKIP Perangkat Daerah																		Persentase pelayan an yang		Persentase hasil koordinasi yang diindaklanjuti			
Perencanaan, Penganggaran,		Administrasi Keuangan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Penyediaan Jasa Penunjang		Pengadaan Barang milik daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan			
Persentase indikator program		Persentase realisasi anggaran		IP ASN Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan						Persentase penyediaan jasa		Persentase Penyediaan Barang milik		Persentase Barang Milik Daerah dalam		Jumlah Perijinan dan Non		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan/Material Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN bulanan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Bangunan atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterliban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Dawarblandong Tahun 2024 mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pemerintah kabupaten Mojokerto yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dawarblandong untuk 5 tahun mendatang yaitu **Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal**. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
 - 6) Penyediaan Bahan/Material
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 1) Pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas

jabatan

2) Pengadaan Mebel

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

c. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

3) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 3.2 (T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dawarblandong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Ca tat an Pe nti ng	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Dawarbla ndong	79,18	3.495.075.785	APB D Kab		80,48	4.351.362.760
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi				1 Inovasi	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Dawarblan dong	7 Dokumen	15.000.000	APB D Kab		7Dokume n	17.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Dawarblan dong	17 laporan	21.000.000	APB D Kab		18 laporan	25.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dawarblan dong	24 orang/bu lan	2.704.132.000	APB D Kab		24 orang/bu lan	3.310.256.890
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Dawarblan dong	17 dokumen	11.000.000	APB D Kab		17 dokumen	15.000.0000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Dawarblan dong	30 paket	21.450.000	APB D Kab		30 paket	32.600.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Dawarblan dong	30 Orang	20.000.000	APB D Kab		30 Orang	18.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Kec. Dawarblan dong	1 paket	8.000.000	APB D Kab		1 paket	12.600.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Dawarblan dong	7 paket	115.000.000	APB D Kab		8 paket	150.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Dawarblan dong	1 Paket	50.000.000	APB D Kab		1 Paket	60.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Dawarblan dong	1 paket	20.000.000	APB D Kab		1 paket	30.000.000

	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kec. Dawarblan dong	365 Dokumen	5.000.000	APB D Kab		365 Dokumen	5.000.000
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Dawarblan dong	1 Paket	40.000.000	APB D Kab		1 Paket	50.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dawarblan dong	150 Laporan	20.000.000	APB D Kab		150 Laporan	25.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Dawarblan dong	12 Laporan	55.770.595	APB D Kab		12 Laporan	58.905.860
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Dawarblan dong	16 Laporan	62.400.000	APB D Kab		36 Laporan	45.00.000
Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah									
	Pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kec. Dawarblan dong	8 unit	143.52.000	APB D Kab		8 unit	295.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Dawarblan dong	1 paket	12.196.400	APB D Kab		1 paket	15.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Dawarblan dong	2 unit	50.466.800	APB D Kab		2 unit	60.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Dawarblan dong	2 unit	75.000.000	APB D Kab		2 unit	850.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Dawarblan dong	25 Unit	45.140.000	APB D Kab		25 Unit	55.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Dawarblan dong	82%	30.000.000	APB D Kab		83%	45.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	Kec. Dawarblan dong	500 Laporan	32.000.000	APB D Kab		500 Laporan	35.000.000
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Kec. Dawarblan dong	82%	450.000.000	APB D Kab		83%	360.000.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi	Kec. Dawarblan dong	12 Dokumen	100.000.000	APB D Kab		12 Dokumen	105.000.000

		dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa							
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Dawarblan dong	12 Dokumen	100.000.000	APB D Kab		12 Dokumen	105.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Dawarblan dong	12 Dokumen	100.000.000	APB D Kab		12 Dokumen	105.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Kec. Dawarblan dong	24 Dokumen	195.000.000	APB D Kab		24 Dokumen	175.000 000
JUMLAH					4.022.075.795	JUMLAH			4.881.362.750

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud.

Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto tahun 2024, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2024

KECAMATAN DAWARBLANDONG

KABUPATEN MOJOKERTO

KODE SKPD : 7.01.0.00.0.00.08

NAMA SKPD : KECAMATAN DAWARBLANDONG

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PRIORITA S DAERAH	SASARA N DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024
					HASIL PROGRAM		HASIL KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN		
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	UNSUR KEWILAYAHAN										
I. 1	KECAMATAN										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Kec. Dawarbl andong	Nilai SAKIP Perangk at Daerah	79,18					3.495.075.795

					Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	24 Dokumen			36.000.000
I	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		,	Kec. Dawarblandong					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000
				Kec. Dawarblandong							
				Kec. Dawarblandong							

I. 1	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kec. Dawarblandong					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	21.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	100 %			2.715.132.000
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kec. Dawarblandong					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	2.704.132.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								Jumlah Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	11.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						IP ASN Perangkat Daerah	67,20			41.450.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kec. Dawarblandong					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut		21.450.000

									Kelengkapan		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kec. Dawarblandong					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	20.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%			258.000.000
	- Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Dawarblandong					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	8.000.000
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Dawarblandong					Jumlah Paket Peralatan dan	2 paket	115.000.000

									Perlengkap an Kantor yang Disediakan		
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kec. Dawarbla ndong					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Dawarbla ndong					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	1 Paket	20.000.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan an Peraturan Perundang-undangan			Kec. Dawarbla ndong					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	365 Dokume n	5.000.000
	- Penyediaan Bahan/Material			Kec. Dawarbla ndong					Jumlah Paket Bahan/Mater ial yang Disediakan	1 Paket	40.000.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kab. Mojokert					Jumlah Laporan	150 Laporan	20.000.000

	SKPD			o, Dawarbla ndong					Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase penyediaa n jasa penunjang urusan pemerinta han daerah sesuai kebutuhan	100%			106.918.021
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Dawarbla ndong					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.918.021
	; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kec. Dawarbla ndong					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	54.000.000

	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	100%			155.716.400
	Pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan								Jumlah unit kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	8 unit	143.520.000
	Pengadaan Mebel								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	12.196.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%			170.606.800

	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kec. Dawarblandong					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	50.466.800
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kec. Dawarblandong					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	75.000.000
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya			Kec. Dawarblandong					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25 Unit	45.140.000

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%					32.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	500 dokumen			32.000.000
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan			Kab. Mojokerto, dawarblandong, Semua Desa					Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	500 Laporan	32.000.000

3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%					495.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	76 Fasilitasi			495.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Desa					Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	100.000.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Desa					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	12 Dokumen	100.000.000

									nan Desa		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Desa					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	100.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Desa					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	24 Dokumen	195.000.000
											4.022.075.795

BAB V

PENUTUP

1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2024 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dawarblandong, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Dawarblandong, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendari Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2024 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

1.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Dawarblandong diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di

pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Mojokerto, September 2023



AKHMAD TAUFIQ, S.Sos., MM.

PEMBINA

NIP. 197006261990031006

